

**RELEVANSI BIROKRASI WEBERIAN TERHADAP PENGUATAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

**Natasya Eva Tania¹, Dela Puspita², Annisa Kurnia Sari³,
Aulia Neza Agustin Febriana⁴, Fitria Novita Sari⁵,
Universitas Tidar**

Email: ¹ natasya.tania@students.untidar.ac.id ² Puspitadela902@students.untidar.ac.id ³ annisa.kurnia.sari@students.untidar.ac.id ⁴ aulia.neza.agustin.febriana@students.untidar.ac.id
⁵ fitria.novita.sari@students.untidar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the concept of Weberian bureaucracy and assess its relevance to improving and strengthening governance in Indonesia. The research focuses on answering how Weberian principles are understood within the context of public administration and the extent to which these principles can support a professional, accountable, and effective government system. The study employs a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained from Max Weber's works, public administration literature, scholarly articles on bureaucracy, and policy documents related to Indonesia's Bureaucratic Reform agenda. Data collection was carried out through systematic literature review by reading, noting, and categorizing key information. The data were analyzed using content analysis to interpret central ideas concerning legal-rational authority, hierarchical structures, impersonal rules, and bureaucratic professionalism. The findings indicate that Weberian principles remain relevant as a foundational framework for establishing a structured and accountable bureaucracy. However, Indonesia's bureaucratic system continues to face challenges such as a rigid hierarchical arrangements, slow technological adaption, and the persistence of patronage culture. Therefore, Weberian principles need to be integrated with modern governance innovations to enhance bureaucratic performance and improve the quality of public services.

Keyword: *Weberian Bureaucracy; Governance Reform; Public Administration.*

Pendahuluan

Birokrasi dalam administrasi publik dipahami sebagai suatu sistem yang dirancang untuk menjaga ketertiban, stabilitas, dan konsistensi dalam pelaksanaan pemerintahan melalui regulasi, prosedur, serta pembagian kekuasaan yang jelas. Birokrasi berperan dalam mengkonversi kebijakan menjadi tindakan administratif yang efisien, sehingga kualitas birokrasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan nasional (Nugroho, 2017). Pemahaman mengenai birokrasi sebagai mekanisme yang mengatur hubungan kekuasaan, pola kerja, dan prosedur pelayanan publik merupakan dasar penting untuk menilai cara pemerintah beroperasi serta bagaimana kualitas tata kelolanya dapat diperbaiki. Dalam hal ini, birokrasi berfungsi bukan sekedar alat administratif, melainkan juga sebagai institusi yang menentukan bagaimana pemerintah bereaksi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu, penguatan birokrasi menjadi agenda penting untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam implementasinya di lapangan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola, mulai dari tingginya kasus korupsi, rendahnya akuntabilitas, hingga tumpang tindih kewenangan antar instansi (Rahman, 2022). Walaupun pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan, penyusunan aturan kepegawaian, dan program penyederhanaan proses, kendala pelaksanaan masih tetap ada, terutama di tingkat pelaksanaan (Adi, 2018). Hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara desain kebijakan reformasi birokrasi dan realitas pelaksanaannya, sehingga perubahan struktural belum sepenuhnya meningkatkan kinerja birokrasi secara nyata. Tantangan ini semakin kuat ketika birokrasi diminta untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi sehubungan dengan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif. Situasi ini menegaskan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini.

Selain masalah struktural, kapasitas sumber daya manusia dalam aparatur juga menjadi tantangan utama dalam proses reformasi birokrasi. Berdasarkan pendapat Maysura (2025), penerapan sistem merit sebagai elemen fundamental profesionalisme birokrasi masih terhambat oleh pengaruh politik, minimnya pemahaman aparatur mengenai prinsip meritokrasi, dan lemahnya pengawasan regulatif. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa reformasi birokrasi belum disertai dengan perubahan kultural dan profesional yang cukup. Padahal, peningkatan kualitas aparatur sangat memengaruhi bagaimana birokrasi dapat memaknai tujuan kebijakan dengan

konsisten dan objektif. Dengan demikian, adanya ketidaksesuaian antara harapan terhadap kualitas aparatur dan kondisi di lapangan menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya memandang reformasi birokrasi sebagai proses teknokratis, tetapi juga sebagai perubahan yang memerlukan integritas, kompetensi, dan komitmen yang berkelanjutan.

Kerangka birokrasi Weberian dan dokumen Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 memberikan panduan tentang cara kerja birokrasi ideal melalui prinsip rasionalitas, hierarki yang jelas, profesionalisme, dan aturan formal yang konsisten (Kementerian PANRB, 2010). Namun penerapannya masih terhalang oleh kendala operasional dan kultural (Komang Suryaningsih et al., 2025). Kendala – kendala tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana konsep ideal ini dapat menjelaskan dan memahami kondisi birokrasi di Indonesia saat ini.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari literatur administrasi publik, artikel ilmiah tentang birokrasi, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan agenda Reformasi Birokrasi Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka sistematis dengan membaca, mencatat, dan mengkategorikan informasi kunci. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis isi untuk menafsirkan gagasan-gagasan sentral mengenai otoritas legal-rasional, struktur hierarkis, aturan impersonal, dan profesionalisme birokrasi.

Pembahasan

Kondisi Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia

Kondisi tata Kelola pemerintahan di Indonesia saat ini menunjukkan adanya upaya besar untuk membangun birokrasi yang jelas lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini jelas melalui pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 - 2025, yang menjadi kerangka utama dalam mengarahkan transformasi birokrasi nasional. Reformasi ini menempatkan tiga aspek penting sebagai fokus pembangunan, yaitu (1) peningkatan kualitas sumber daya aparatur; (2) efektivitas kelembagaan; serta (3) perbaikan pelayanan publik. Melalui berbagai program seperti penyederhanaan organisasi, digitalisasi administrasi, dan penguatan budaya kerja, pemerintah berupaya menciptakan birokrasi yang tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga berorientasi pada hasil dan capaian kinerja.

Salah satu langkah strategis dalam reformasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. ZI dirancang sebagai bentuk komitmen instansi pemerintah dalam mengembangkan budaya antikorupsi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengawasan internal. Di berbagai instansi, penerapan ZI telah mendorong perubahan signifikan dalam pola pikir dan perilaku. Keberhasilan ZI tidak selalu merata karena masih dipengaruhi oleh karakteristik organisasi dan kapasitas internal masing – masing lembaga.

Transformasi besar lainnya terlihat melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi tonggak penting dalam modernisasi administrasi negara. SPBE mendorong instansi pemerintah untuk mengintegrasikan layanan, memanfaatkan teknologi informasi, serta mengurangi proses manual yang berpotensi membuka ruang bagi penyimpangan. Melalui digitalisasi, pemerintah berupaya meningkatkan kecepatan pelayanan, memperbaiki akurasi data, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administratif.

Meskipun reformasi birokrasi telah menghasilkan banyak kemajuan, birokrasi Indonesia masih dibayangi tantangan struktural dan kultural yang sudah berlangsung lama. Masalah korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), politisasi jabatan, ketidakpastian prosedur, serta budaya patrimonial menjadi hambatan utama dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang ideal. Praktik patronase dalam proses seleksi dan promosi pegawai seringkali melemahkan sistem merit yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, struktur birokrasi yang berlapis dan prosedur administrasi yang berbelit – belit membuat proses layanan publik berjalan lambat dan tidak efisien.

Dalam konteks pelayanan publik, ketidakseragaman standar operasional prosedur (SOP), standarisasi layanan, serta perbedaan kapasitas antar wilayah menyebabkan kualitas pelayanan tidak konsisten. Hal ini semakin terlihat saat pandemi COVID-19. Ketika banyak instansi mengalami kesulitan menyesuaikan layanan digital, karena belum memiliki pedoman operasional yang jelas. Kondisi ini memperkuat temuan, bahwa birokrasi Indonesia perlu memperbaiki dokumentasi aturan serta memperkuat kapabilitas digital agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Relevansi Birokrasi Weberian untuk Indonesia

Model birokrasi Weberian telah lama menjadi dasar bagi administrasi modern dengan ciri – ciri utama seperti rasionalitas, sistem hierarkis, aturan tertulis, spesialisasi dalam pekerjaan, dan

sistem karir yang berbasis merit (Weber, 1946). Di Indonesia, prinsip – prinsip tersebut tidak hanya diuraikan dalam teori administrasi, tetapi juga terlihat dalam kebijakan pemerintah seperti Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menetapkan profesionalisme ASN, efektivitas lembaga, dan peningkatan mutu layanan publik sebagai fokus utama reformasi. Di tengah kerumitan tata kelola pemerintahan di Indonesia yang melibatkan ribuan unit birokrasi dan jutaan pegawai, model Weberian tetap relevan, meskipun harus diadaptasi untuk memenuhi tuntutan era digital serta perubahan sosial-politik yang semakin cepat.

Relevansi model Weberian dapat dilihat jelas dalam penekanan pada hierarki sebagai dasar untuk menentukan kewenangan dan jalur komando. Struktur yang hierarki berfungsi untuk memastikan bahwa birokrasi memiliki proses kerja yang sesuai, tidak tumpang tindih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian tentang penerapan model Weber di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunjukkan bahwa pemisahan tugas yang jelas, alur kerja formal, dan pendelegasian kewenangan yang teratur membantu meningkatkan efisiensi organisasi dan memudahkan kontrol internal. Hasil penelitian ini sejalan dengan gagasan Gulick (1937) mengenai tujuan reformasi birokrasi nasional yang menggarisbawahi pentingnya organisasi yang terstruktur dengan baik dan tidak berlebihan. Di dalam birokrasi Indonesia yang memiliki jangkauan kendali yang luas dan beragam fungsi pelayanan, keberadaan hierarki formal sangat penting agar kebijakan dan instruksi dapat disampaikan secara konsisten dari pusat hingga daerah, serta mengurangi konflik antarunit.

Selain hierarki, relevansi dari model Weberian juga terlihat dalam kebutuhan akan standarisasi prosedur sebagai cara untuk mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepastian layanan publik. Aturan tertulis dan SOP formal adalah salah satu unsur paling mendasar dari model Weber. Bagi Weber, dokumentasi aturan yang baik berfungsi untuk mengurangi bias, menjaga keadilan, dan memastikan bahwa setiap tindakan administratif dapat diaudit. Dalam konteks di Indonesia, kebutuhan ini tercermin dalam Peraturan Presiden Reformasi Birokrasi yang menyoroti penyederhanaan proses layanan serta standar prosedur agar konsistensi dapat terjaga di seluruh instansi pemerintah. Praktik ini sejalan dengan pemikiran Simon (1947) yang menekankan bahwa pengambilan keputusan administratif yang rasional membutuhkan prosedur formal yang jelas agar organisasi dapat bekerja secara efisien. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa birokrasi Indonesia sering kali menghadapi masalah ketidakkonsistenan dalam pelayanan, terutama prosedur tidak teratur dengan baik atau berbeda-beda antar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa

adanya aturan tertulis yang jelas masih sangat penting untuk memperkuat pengelolaan layanan publik.

Relevansi Weberian semakin terasa saat dikaitkan dengan pentingnya sistem merit dalam birokrasi di Indonesia. Weber (1946) sangat menentang birokrasi yang beroperasi berdasarkan patronase, hubungan personal, atau loyalitas yang tidak resmi. Menurut Weber, posisi publik seharusnya diisi oleh individu yang memiliki keahlian teknis dan rekam jejak profesional yang mematuhi kriteria. Prinsip ini sejalan dengan upaya panjang Indonesia untuk mengurangi praktik KKN yang telah lama berakar dalam birokrasi. Sistem merit menjadi kunci dalam profesionalisasi ASN dengan menjamin bahwa proses seleksi, promosi, dan mutasi dilakukan berdasarkan kualifikasi dan objektivitas, bukan kedekatan politik atau pribadi. Dokumen kebijakan nasional, termasuk regulasi Komisi ASN (KASN), juga disusun untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang mengisi posisi struktural memiliki standar kompetensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penerapan prinsip Weberian dalam bentuk sistem merit menjadi strategi penting untuk mengurangi praktik nepotisme dan memperkuat integritas birokrasi. Pemikiran Weber mengenai sistem merit juga dipengaruhi oleh tokoh administrasi modern seperti Frederick Mosher (1968), yang menyatakan bahwa profesionalisme aparatur negara merupakan syarat utama keberhasilan *governance*.

Aturan yang tercatat sebagai elemen dari Weberianisme juga memegang peranan penting dalam menjaga kejelasan layanan publik. Layanan yang didasarkan pada prosedur tertulis membantu masyarakat mendapatkan perlakuan yang serupa tanpa tergantung pada individu petugas yang bertugas melayani. Dalam beberapa penelitian tentang layanan publik selama COVID-19, tampak bahwa banyak masalah muncul karena belum adanya SOP digital yang terdefinisi dengan baik. Masyarakat sering mengeluh karena kebingungan dalam prosedur layanan *online*, perbedaan instruksi dari pejabat yang berbeda, dan kurangnya panduan standar. Ini memperkuat pendapat bahwa aturan tertulis tetap merupakan fondasi penting dalam memastikan birokrasi memberikan layanan yang konsisten, transparan, dan dapat diprediksi, khususnya pada sektor yang berhubungan dengan kepentingan publik seperti administrasi kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pandangan ini juga diperkuat oleh Denhardt & Denhardt (2000) dalam *New Public Service*, yang menekankan bahwa birokrasi modern memerlukan prosedur yang jelas agar dapat melayani warga secara efektif dan menjaga kepercayaan publik.

Namun, meskipun birokrasi yang diusulkan Weber tetap punya relevansi, model ini juga menunjukkan banyak kekurangan yang signifikan dalam era pemerintahan saat ini. Salah satu kritik paling utama terhadap konsep Weber adalah sikapnya yang terlalu kaku dan sangat bergantung pada struktur hierarki. Osborne & Gaebler (1992), tokoh utama *New Public Administration (NPM)*, mengkritik model Weberian karena dianggap terlalu lambat, tidak inovatif, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak keadaan birokrasi perlu fleksibilitas untuk dapat menghadapi perubahan yang cepat. Adanya hierarki yang panjang serta prosedur yang berlapis-lapis dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Dalam laporan yang membahas bagaimana birokrasi merespon selama pandemi, terlihat jelas bahwa birokrasi mengalami “keterbatasan” karena struktur formal dan prosedur tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan kebijakan yang terjadi dengan cepat. Birokrasi menjadi lamban dan kurang responsif, terutama ketika harus beradaptasi dengan mekanisme pelayanan digital dalam waktu singkat.

Kekurangan lainnya adalah lambatnya birokrasi Weber dalam menanggapi kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Model Weber diciptakan pada masa masyarakat industri di abad ke-20, ketika perubahan berlangsung secara relatif stabil. Di era digital ini, inovasi dan teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan birokrasi untuk beradaptasi. Hal ini terlihat jelas dalam perkembangan *e-government* di Indonesia yang masih tertahan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian yang mengungkapkan kendala infrastruktur digital, rendahnya literasi digital di kalangan ASN, dan ketidaksiapan SOP untuk layanan berbasis teknologi. Jika Weberianisme diterapkan secara kaku tanpa adanya ruang untuk fleksibilitas, birokrasi tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang mendambakan layanan yang cepat, responsif, dan berbasis teknologi.

Oleh karena itu, berbagai kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia saat ini menekankan pentingnya penyesuaian Weberian dengan model *governance* yang lebih modern. Perubahan ini tidak dilakukan dengan menghapuskan Weberianisme, melainkan dengan mengintegrasikan elemen rasionalitasnya dengan nilai-nilai seperti transparansi, kolaborasi, akuntabilitas berbasis kinerja, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital. Kombinasi ini memungkinkan birokrasi tetap memiliki basis yang solid melalui struktur hirarkis dan prosedur formal, tetapi juga lebih gesit dalam menghadapi berbagai perubahan. Contoh Grand Design Reformasi Birokrasi menekankan bahwa birokrasi perlu beralih dari birokrasi yang berbasis aturan menjadi birokrasi

berbasis kinerja, sehingga tidak hanya sekedar mengikuti peraturan, tetapi juga berupaya mencapai hasil dan dampak yang konkret.

Salah satu bentuk penyesuaian yang paling strategis adalah percepatan penerapan *e-government*. Digitalisasi dalam birokrasi membantu mengatasi kekakuan yang menjadi ciri khas Weberian. Dengan sistem digital, proses birokrasi dapat dipangkas, alur informasi dapat dipercepat, dan pelayanan dapat distandarisasi tanpa harus melalui prosedur manual yang berbelit-belit. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan karena semua proses dapat direkam dan diaudit. Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan *e-government* tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi harus didukung dengan reformasi SOP, peningkatan keterampilan ASN, serta penataan ulang alur kerja agar selaras dengan sistem digital yang digunakan. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Christopher Hood (1991) dan Osborne & Gaebler (1992) dalam *New Public Management (NPM)*, yang menekankan pentingnya kinerja, inovasi, efisiensi, dan orientasi pada pelayanan. Dalam paradigma yang lebih baru, seperti *New Public Governance (NPG)*, Osborne (2006) menekankan pentingnya kolaborasi lintas aktor dan fleksibilitas organisasi untuk menghadapi kompleksitas kebijakan publik, sesuatu yang tidak dapat disediakan oleh Weberianisme secara murni.

Adaptasi lainnya yang juga sangat penting adalah penguatan nilai profesionalisme dan integritas ASN. Penerapan sistem merit merupakan salah satu wujud aktualisasi Weberian dalam konteks modern. Dengan memastikan bahwa setiap pegawai terpilih berdasarkan kompetensi dan kinerja, birokrasi bisa mengurangi praktik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Profesionalisme ASN juga menjadi syarat untuk keberhasilan penerapan *e-government*, karena tanpa pegawai yang memiliki keterampilan teknis dan integritas yang baik, digitalisasi hanya akan menghasilkan teknologi tanpa memberikan efektivitas layanan. Reformasi birokrasi di Indonesia saat ini menempatkan kompetensi, etika, disiplin, dan integritas ASN sebagai syarat utama untuk membangun birokrasi yang adaptif dan modern.

Implikasi Terhadap Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Model birokrasi Weberian sejak lama menjadi pijakan dasar dalam administrasi modern karena menekankan rasionalitas, aturan formal, struktur hierarki yang tegas, spesialisasi tugas, serta sistem karir yang didasarkan pada sistem merit (Weber, 1946). Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut tidak hanya tercantum dalam literatur administrasi publik, tetapi juga diterjemahkan

dalam berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dokumen reformasi tersebut merumuskan pentingnya profesionalisme aparatur, efektivitas organisasi, dan peningkatan mutu layanan publik. Dengan skala birokrasi yang sangat besar dan struktur yang rumit, nilai-nilai Weberian masih memiliki tempat penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, meskipun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan tuntutan era digital dan perubahan sosial-politik yang berkembang cepat.

Relevansi Weberian dapat terlihat melalui penekanan pada hierarki sebagai mekanisme yang mengatur jalannya komando dan pembagian kewenangan. Struktur hierarkis memastikan bahwa proses administrasi berjalan tertib, tidak tumpang tindih, dan memiliki hubungan pertanggungjawaban yang jelas. Penelitian mengenai penerapan prinsip Weberian di Sekretariat DPD RI menunjukkan bahwa kejelasan pembagian tugas, prosedur kerja yang formal, serta mekanisme pendelegasian kewenangan yang sistematis mampu meningkatkan efisiensi organisasi yang terstruktur dengan baik, menjadi kunci utama dalam reformasi birokrasi. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki jangkauan birokrasi luas dan fungsi pelayanan yang beragam, kehadiran hierarki formal sangat diperlukan agar kebijakan dapat diteruskan secara konsisten dari pusat hingga daerah serta mengurangi potensi konflik antar-unit.

Selain struktur hierarkis, kebutuhan akan standarisasi prosedur juga memperlihatkan pentingnya prinsip Weberian dalam birokrasi di Indonesia. Weber menilai bahwa aturan tertulis dan SOP merupakan dasar untuk menjamin kepastian administrasi, menghindari bias, dan memastikan seluruh tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, urgensi ini tampak dalam Perpres Reformasi Birokrasi yang menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur serta konsistensi standar layanan. Pemikiran ini sejalan dengan Herbert Simon (1947), yang menegaskan bahwa keputusan yang rasional hanya dapat dicapai apabila organisasi memiliki prosedur formal yang jelas. Berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa ketidakteraturan SOP di banyak instansi sering menyebabkan ketidakseragaman layanan, terutama di daerah, sehingga memperlihatkan bahwa aturan tertulis tetap menjadi fondasi utama untuk penguatan tata kelola layana publik.

Penerapan nilai Weberian semakin penting ketika dikaitkan dengan sistem merit dalam birokrasi Indonesia. Weber menolak birokrasi yang beroperasi berdasarkan patronase atau kepentingan personal dan menekankan bahwa jabatan publik harus diisi oleh individu yang memiliki kemampuan teknis serta rekam jejak yang jelas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah

Indonesia dalam menekan praktik KKN melalui penerapan sistem merit. Kebijakan KASN dan berbagai regulasi terkait dirancang untuk memastikan bahwa proses promosi, mutasi, dan pengisian jabatan dilakukan secara objektif dan profesional. Pemikiran Weber diperkuat oleh Frederick Mosher (1968) yang menyatakan bahwa profesionalisme aparatur merupakan syarat fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kebutuhan akan aturan tertulis juga sangat relevan dalam situasi layanan publik yang berubah cepat, seperti saat pandemi COVID-19. Banyak persoalan muncul akibat minimnya standar operasional layanan digital, menyebabkan ketidakkonsistenan instruksi dan kebingungan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun arah birokrasi mulai beralih ke layanan digital, prinsip dasar Weber mengenai aturan tertulis tetap penting untuk menjaga konsistensi, transparansi, dan kepastian dalam pelayanan publik. Pandangan ini juga diperkuat oleh Denhardt & Denhardt (2000) melalui konsep *New Public Service*, yang menekankan bahwa kejelasan prosedur merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperbaiki kualitas pelayanan.

Meskipun Weberianisme memiliki banyak kelebihan, model ini juga memiliki keterbatasan yang semakin terlihat dalam era digital. Kritik utama dari Osborne dan Gaebler (1992) yang menyatakan bahwa model birokrasi Weber cenderung kaku, lambat, dan kurang inovatif. Struktur hierarki yang panjang dan prosedur yang berlapis-lapis seringkali menghambat kemampuan birokrasi dalam menanggapi perubahan cepat. Hal ini tampak dalam pengalaman birokrasi Indonesia selama pandemi, ketika prosedur formal tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan yang berubah cepat dan kebutuhan digitalisasi layanan publik yang mendesak.

Keterlambatan birokrasi dalam mengikuti perkembangan teknologi juga menunjukkan keterbatasan Weberianisme. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa *e-government* Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lain, antara lain karena keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi di kalangan ASN, dan SOP layanan digital yang belum matang. Jika diterapkan secara kaku, birokrasi Weberian tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan layanan cepat, responsif, dan berbasis teknologi.

Karena itu, kebijakan reformasi birokrasi Indonesia mencoba menggabungkan nilai Weberian dengan pendekatan modern, seperti NPM dan NPG. Pendekatan ini tidak menghapus Weberianisme, tetapi mengadaptasinya agar lebih fleksibel dengan mengutamakan kinerja, inovasi, transparansi, kolaborasi lintas aktor, serta pemanfaatan teknologi digital. Grand Design Reformasi

Birokrasi mendorong transformasi birokrasi bukan sekedar mengikuti aturan menjadi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Digitalisasi dan integrasi layanan menjadi solusi strategis untuk mengurangi kekakuan prosedural Weberian dan meningkatkan efisiensi serta transparansi layanan publik.

Keberhasilan adaptasi ini tetap bergantung pada kualitas ASN. Oleh karena itu, penguatan kompetensi, integritas, dan profesionalisme pegawai menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Sistem merit memastikan pegawai yang mengisi jabatan strategis benar-benar kompeten, sehingga birokrasi mampu beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi dan perubahan sosial. Dengan demikian, prinsip Weberian tetap relevan sebagai fondasi, tetapi harus dipadukan dengan pendekatan modern agar birokrasi Indonesia mampu bekerja lebih efisien, responsif, dan berintegritas.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip birokrasi weberian seperti rasionalitas, struktur hirarki, spesialisasi tugas, aturan tertulis, impersonalitas, dan sistem merit, tetap menjadi fondasi penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penerapan prinsip – prinsip ini membantu menciptakan birokrasi yang terstruktur, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik secara konsisten. Namun, birokrasi Weberian juga memiliki keterbatasan dalam menghadapi tuntutan pemerintahan modern, termasuk kebutuhan akan fleksibilitas, inovasi, responsivitas terhadap perubahan sosial-politik, dan adaptasi terhadap teknologi digital. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menuntut integrasi antara prinsip Weberian dengan pendekatan modern, seperti digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, kolaborasi lintas lembaga, serta peningkatan profesionalisme aparatur. Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai dasar perumusan kebijakan reformasi birokrasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil. Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat menelaah secara empiris efektivitas penerapan prinsip Weberian yang telah diadaptasi dengan model *governance* modern, serta dampaknya terhadap kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat.

Daftar Pustaka

Adi, Y. (2018). *Bureaucratic reform to the improvement of public services: Challenges for Indonesia*. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1), 15–29.

- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (Expanded ed.). Routledge.
- Evans, P., & Rauch, J. E. (1999). Bureaucracy and growth: A cross-national analysis of the effects of Weberian state structures on economic growth. *American Sociological Review*, 64(5), 748–765.
- Faedlulloh, D., Karmilasari, V., Utami, A., & Fadoli, M. I. (2023). Examining the Indonesia bureaucracy response and problem in pandemic times: A preliminary diagnostic study. *KnE Social Sciences*, 8(5), 635–644. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13029>
- Henderson, A., & Parsons, W. (2017). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector* (Global ed.). Routledge.
- Isvandanu Wicaksono, & Aji, M. P. (2025). Weber's ideal bureaucracy implementation in the secretariat bureau of headship at the secretariat general of the regional representative council. *Administratio*, 16(1), 69–84. <https://doi.org/10.23960/administratio.v16i1.483>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2010). *Grand design reformasi birokrasi 2010–2025 (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)*.
- Komang Suryaningsih, N. D. U., Dewi, I. A. P. S., & Widnyani, I. A. P. S. (2025). Transformation of administration and government bureaucracy in efforts to improve the quality of public services. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(1), 145–152.
- Maysura, N. A. (2025). Peran sistem merit dalam reformasi birokrasi di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam perspektif hukum administrasi negara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(1), 85–105.
- Meuleman, L. (2018). *Metagovernance for sustainability: A framework for implementing the Sustainable Development Goals*. Routledge.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Peters, B. G. (2010). *The politics of bureaucracy* (6th ed.). Routledge.
- Rahman, H. (2022). Reformasi birokrasi: Korupsi dalam birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 135–161.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D, dan penelitian pendidikan*. Alfabeta.

- Taufik, T. (2021). Reformasi birokrasi: Belajar dari upaya reformasi sumber daya manusia aparatur di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(2), 117–130.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.